

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Masa pelimpahan kewenangan daerah saat ini menempatkan transparansi serta akuntabilitas pengaturan anggaran sebagai prioritas guna mendukung terwujudnya *good governance* (Kusumawati, 2024). Laporan tahunan *Association of Certified fraud Examiners (ACFE)* mengilustrasikan yakni yang paling rentan menggeluti praktik kecurangan adalah sektor pemerintahan, pemerintah lokal pun termasuk menjadi salah satunya meliputi penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, maupun korupsi kolusif (ACFE, 2024).

Lembaga otoritas Indonesia di tingkat nasional tengah menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan mandat otonomi yang besar ke desa untuk mengelola keuangannya sendiri demi mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan. Sebagai salah satu instrumen utama, pemerintah membentuk BUMDes memiliki sumber daya berupa modal, keuntungan, dan tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa (Sinarwati dkk., 2023), serta BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang menjadi salah satu tujuan utama pendiriannya (Sinarwati & Prayudi, 2021). (Sinarwati, 2023) menegaskan bahwa pengembangan BUMDes melalui kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah mampu meningkatkan kapasitas

kewirausahaan desa, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), khususnya dalam mengurangi kemiskinan di tingkat desa (Ni Kadek Sinarwati, 2025).

Fakta Empirinya memunculkan bahwa implementasi kebijakan ini juga menjadi *opportunity* /celah bagi terjadinya penyelewengan dalam pengaturan dana BUMDes, terutama di lingkungan BUMDes. Isu kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk di dalamnya manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana, dan lemahnya sistem kontrol, menjadi persoalan yang semakin mengemukakan (Dewi, 2022).

Fenomena ini terjadi bukan hanya karena pengawasan eksternal lemah, melainkan karena adanya faktor dari dalam seperti rendahnya moralitas individu, kekurangannya sistem pengendalian internal (Fernandhytia & Muslichah, 2020), dan terbatasnya penerapan sistem informasi akuntansi (Alfalah, 2025), ketiga hal ini berpotensi menciptakan lingkungan yang rawan akan *fraud*, sejalan dengan konsep *Hexagon Theory*, di mana tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, kolusi, dan arogansi menjadi bagian dari faktor utama terjadinya perilaku curang. Penelitian oleh (Putra, 2023), menunjukkan fakta moralitas individu serta pengendalian internal secara signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kondisi ini sangat relevan di Kabupaten Buleleng dikarenakan pengelolaan BUMDes, yang menurut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, 2025) Kabupaten Buleleng menempati posisi kedua kategori BUMDes terbanyak di Provinsi Bali dengan jumlah 126 Bumdes. Meskipun bukan yang terbanyak secara kuantitas, Kabupaten Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena dalam empat

tahun terakhir terjadi berulangnya kasus *fraud* dalam pengelolaan BUMDes, menjadikan fenomena ini sebagai dasar kuat untuk dikaji lebih dalam

**Tabel 1. 1**  
**Data BUMDes Tiap Kabupaten di Provinsi Bali**

No.	Kabupaten	Jumlah BUMDes
1.	Jembrana	41
2.	Tabanan	133
3.	Badung	46
4.	Gianyar	62
5.	Klungkung	48
6.	Bangli	68
7.	Karangasem	71
8.	Buleleng	126
9.	Denpasar	27
<b>TOTAL</b>		<b>622</b>

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025)

Data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat menyatakan bahwa pada tahun 2020 sedikitnya kasus kecurangan dalam BUMDes di Buleleng terjadi sebanyak 22 kasus, selanjutnya dari tahun 2021-2023 terjadi kembali pengulangan kasus serupa di beberapa kecamatan dengan dominasi kasus di Kecamatan Banjar, Seririt dan Busungbiu sedangkan tahun 2024-2025 menjadi tahun terbitnya putusan dan pemberian tindakan atas kasus-kasus tersebut.

**Tabel 1. 2**  
**Tren Kasus Kecurangan BUMDes Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024**

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Akumulasi Kasus & Kasus Terbaru di BUMDes
Sawan	5	0	0	0	0	5 kasus, tidak ada kasus baru setelah 2020
Kubutambahan	4	0	0	0	0	4 kasus, tidak ada kasus baru setelah 2020
Gerokgak	3	0	0	0	0	3 kasus dengan tidak ada kasus baru setelahnya

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Akumulasi Kasus & Kasus Terbaru di BUMDes
Busungbiu	3	0	1	0	0	4 kasus dengan kasus terbaru terjadi di BUMdes Gema Matra detik.com (Simabur,2022)
Banjar	3	1	1	0	0	5 Kasus dengan kasus terbarunya terjadi di BUMdes Sadu Ametha terpublikasi di bali.antaranews.com (Yakub,2021 dan Mekar Laba terpubilkasi di baliexpress.com (Rastana,2022)
Tejakula	2	0	0	0	0	2 kasus, tidak ada kasus baru setelah 2020
Seririt	1	0	1	2	0	4 kasus dengan kasus terbarunya terjadi di BUMdes PATMA Patemon yang dipublikasikan di www.intelmediabali.id (Redaksi, 2021) Mandara Lestari Banjarasem, terpublikasi di suradewata.com (Suradewata,2023) Swadesi Mandiri terpublikasi di radarbali.jawapos.com (Ridwan,2023)
Sukasada	1	0	0	0	0	1 kasus, tidak ada kasus baru setelah 2020

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Beberapa situs resmi, 2025)

Terjadinya kasus yang berbeda namun berulang selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 2020-2024 meneliti adanya urgensi untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya *fraud*, terutama dari sisi sumber daya manusia

dan sistem mengefesiensikan keuangannya. Penyampaian (Widiastuti et al., 2024), juga menemukan faktor utama dalam mencegah praktik kecurangan dalam transaksi keuangan BUMDes adalah sistem moralitas internal dan individual. Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak moralitas individual, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan terhadap kecenderungan kecurangan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan tata kelola keuangan BUMDes, tetapi juga mendukung terciptanya iklim pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan good governance dan pembangunan desa berkelanjutan.

Temuan penelitian oleh (Rosifa & Supriatna, 2022) menemukan bahwa kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi karena tidak baiknya pengimplementasian moral individu pengelola, kurang efisiensinya sistem pengendalian internal, serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu dalam pengoprasian sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi. Ketiga faktor ini secara empiris menyokong kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana publik lebih meningkat, termasuk dana BUMDes.

Terjadinya Kecenderungan Kecurangan pada BUMDes yang terus terjadi menyatakan fakta masalah kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes bukanlah hal yang sporadis, melainkan berpotensi menjadi masalah sistemik yang berulang. Penyebab utama yang sering dikaitkan dengan munculnya kecurangan adalah lemahnya moralitas individu, buruknya sistem pengendalian internal, dan rendahnya kompetensi dalam penerapan sistem informasi akuntansi (Rosifa & Supriatna, 2022). Hal ini sejalan dengan konsep *Fraud Hexagon* yang menjelaskan

bahwa kecurangan tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), seperti yang dikemukakan dalam *fraud Triangle* oleh Cressey (1953), namun juga mencakup kompetensi individu (*capability*), keserakahan (*greed*), dan kebutuhan moral (*ego/ethical values*).

*Fraud Hexagon* ini menjadi teori yang mampu menyokong dan memperjelas bahwa selain lingkungan organisasi dan tekanan eksternal, faktor internal pribadi pelaku juga berperan besar dalam memunculkan kecurangan, sebagaimana dijelaskan oleh (Spathis dkk., 2002) dan dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai peneliti dalam kerangka *Fraud Hexagon* (Barus & Sinaga, 2023).

Semakin banyak, kompleks dan perkembangannya yang pesat Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Buleleng, membuat teori *fraud Triangle* terasa belum cukup untuk menjelaskan seluruh pergerakan terjadinya kecurangan, untuk itu diperlukan pendekatan teori yang lebih luas agar penyebab terjadinya *fraud* bisa dipahami secara lebih menyeluruh dan kontekstual. Penelitian ini mengambil langkah strategis dengan memperkuat fondasi teoritis melalui pengembangan teori *Fraud Hexagon* yang dicetuskan oleh Vousinas (2019). Teori ini menambahkan tiga unsur baru: *capability* (kemampuan), *arrogance* (kesombongan moral), dan *collusion* (kolusi) yang secara signifikan memperluas jangkauan analisis terhadap faktor-faktor penyebab *fraud*. Keterkaitan teori ini dengan variabel-variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut.

Moralitas memiliki peran vital sebagai penentu kecenderungan individu dalam mewajarkan perilaku *fraud*. Karyawan yang tidak meingplementasika individunya dengan baik rcenderung lebih mudah merasionalisasi perbuatannya.

Mereka bisa saja berpikir “semua orang juga melakukannya” atau “ini bukan mencuri, hanya mengambil hak saya”, bahkan dalam beberapa kasus, mereka melakukannya dengan sikap arogan, merasa tak akan tertangkap (*arrogance*). Temuan ini diperkokoh penelitian (Phartama dkk.,2025) yang menunjukkan bahwa karakter personal seperti integritas dan moralitas sangat memengaruhi pencegahan *fraud* di tingkat desa.

Moralitas individu dalam penelitian ini menjadi unsur dari dalam diri individu menyangkut nilai dan prinsip etika yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya. Moralitas bukan dipandang secara dikotomis “ada” atau “tidak ada”, melainkan sebagai suatu kontinum yang dapat diukur melalui indikator kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan dan norma. Dengan demikian, seseorang yang memiliki tingkat moralitas tinggi akan bersikap resistif terhadap peluang sehingga mereka tidak melakukan kecurangan, sedangkan individu dengan tingkat moralitas rendah nyatanya semakin rawan mereka memanfaatkannya.

Penelitian sebelumnya telah mendapatkan hasil bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. (Kharisma Febriani dkk.,2024) menemukan bahwa semakin individu memiliki moralitas yang baik, semakin rendah kecenderungan karyawan BPR menormalisasi *fraud*. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Anggara dkk.,2020) pada konteks dana desa, di mana moralitas individu menekan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik. (Dewi, 2022) serta (Adnyana, 2023) memperkuat temuan tersebut dengan menekankan bahwa integritas dan tanggung jawab sebagai bagian dari moralitas individu berperan penting dalam mencegah kecurangan akuntansi.

Merujuk pada bukti empiris tersebut, penggunaan moralitas individu sebagai variabel dalam penelitian ini bukanlah asumsi semata, melainkan didasarkan pada teori perilaku etis dan hasil penelitian terdahulu yang konsisten. Indikator kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan dan norma dipilih karena mampu merefleksikan dimensi moralitas individu yang relevan dengan konteks pencegahan kecurangan di BUMDes.

Fenomena lemahnya moralitas ini semakin tampak nyata dalam sejumlah kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan BUMDes di Kabupaten Buleleng, yang pelakunya justru merupakan pengurus inti seperti ketua, sekretaris, maupun bendahara jabatan yang semestinya melekat pada individu dengan moralitas tinggi, mencakup pemahaman etika kerja, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab individu.

Bukti nyata yang pertama, pelaku operasional sekretaris sekaligus bendahara BUMDes MLB (Kecamatan Seririt) berinisial MAT diduga melakukan penggelapan dana unit simpan pinjam yang menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah (NusaBali.com, 2023). Perbuatan tersebut menunjukkan lemahnya tanggung jawab individu dan ketidakpatuhan terhadap aturan keuangan desa. Kasus serupa terjadi pada BUMDes SM (Kecamatan Seririt), di mana ketua, sekretaris, dan bendahara diperiksa karena dugaan penggelapan dana sebesar Rp384 juta. Meskipun sebagian dana telah dikembalikan, tindakan awal tersebut mencerminkan rendahnya etika kerja dan rasa tanggung jawab terhadap amanah publik (NusaBali.com, 2023).

Kasus lain di BUMDes Gema Matra (Busungbiu) memperlihatkan bahwa mantan bendahara menggunakan dana untuk keperluan pribadi dengan alasan

administratif (jauhnya lokasi bank), padahal hal tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab dan integritas jabatan (DetikBali, 2022). Sementara itu, di BUMDes SA (Kecamatan Banjar), ketua BUMDes diduga menyalahgunakan dana Gerbang Sadu Mandara sebesar Rp1 miliar dengan membuat kredit fiktif atas nama orang lain, yang menunjukkan pelanggaran terhadap aturan formal serta nilai etika publik (NusaBali.com, 2021).

Sistem pengendalian internal yang lemah bagaikan pintu terbuka bagi kecurangan. Ketika mekanisme pengawasan tidak ketat, maka kesempatan (*opportunity*) muncul (Julianto & Pasek, 2022). Terlebih lagi, lemahnya sistem dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan kolusi, yakni kerja sama rentang pelaksana dalam atau luar tentunya diperuntukkan keuntungan pribadi. Penelitian oleh (Phartama dkk.,2025) menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dapat mengurangi risiko kolusi terkait pengelolaan anggaran di BUMDes.

Implementasi sistem informasi akuntansi yang baik melalui digitalisasi dan teknologi informasi sejatinya menjadi tameng dalam mencegah *fraud* karena mengurangi celah manipulasi manual dan meningkatkan transparansi. Namun, di sisi lain, jika pelaku memiliki kapabilitas tinggi dalam bidang teknologi dan menguasai sistem secara menyeluruh, maka teknologi justru bisa disalahgunakan untuk melakukan kecurangan. (Leksono Putri Handayani, 2023) menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan celah kecurangan. Fenomena yang terjadi dilapangan adalah tidak adanya pemab

Bukti dari pentingnya implementasi sistem informasi akuntansi bisa dilihat dari beberapa kasus kecurangan BUMDes Kabupaten Buleleng memperjelas bahwa

pelaku memiliki kapabilitas dan posisi strategis yang memungkinkan mereka mengakses serta memanipulasi data keuangan. Misalnya, pada BUMDes di Kecamatan Seririt dengan inisial MLB, mantan sekretaris sekaligus bendahara dengan inisial MAT menyalahgunakan dana unit simpan pinjam dan menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Hal serupa terjadi di BUMDes SM, di mana sekretaris, bendahara, dan ketua diduga terlibat dalam penggelapan dana sebesar Rp384 juta. Di BUMDes GM, mantan bendahara memanfaatkan kelonggaran operasional untuk tidak menyetorkan dana kas ke bank, namun justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Kasus selanjutnya terjadi di BUMDes ML, dua pengurus mencatat transaksi tabungan nasabah lebih rendah dari jumlah sebenarnya, menunjukkan adanya kerja sama (*collusion*) antarpelaku. Bahkan, pada kasus BUMDes SA, ketua BUMDes menyalahgunakan dana GSM senilai Rp1 miliar melalui pengajuan kredit fiktif atas nama orang lain. Seluruh kasus ini mencerminkan betapa pentingnya implementasi Sistem Informasi Akuntansi yang tidak hanya dirancang untuk efisiensi administrasi, tetapi juga harus mampu memitigasi risiko yang muncul akibat kapabilitas tinggi individu dan potensi kolusi di antara pengurus. Oleh karena itu, variabel SIA menjadi relevan untuk diteliti karena dapat menekan kemungkinan *fraud* yang dipicu oleh kemampuan pelaku dan kerja sama jahat yang terjadi dalam organisasi desa.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak BUMDes yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis digital secara optimal, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi data keuangan secara manual. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dalam (Julianto dkk., 2022) dan

(Anantawikrama Tungga Atmaja, I Made Pradana Adiputra, 2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi sistem informasi akuntansi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan pengawasan, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang akurat dan real-time, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha, terutama dalam kondisi krisis atau keterbatasan seperti saat pandemi.

Temuan sejalan dikemukakan juga oleh (Sinarwati dkk., 2022) yang menjelaskan yakni penggunaan digitalisasi usaha BUMDes secara signifikan mempermudah proses analisis kelayakan usaha, menyajikan data yang akurat, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penelitian lanjutan oleh (Sinarwati dkk., 2023) memperkuat temuan tersebut, di mana digitalisasi sistem perencanaan usaha desa dinilai mampu menyediakan informasi yang transparan, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjadi penguat pengendalian internal BUMDes secara keseluruhan.

Enam Elemen Fraud Hexagon merepresentasikan yakni Kecenderungan. Variabel ini merupakan luaran atau bentuk konkret dari akumulasi tekanan, peluang, pembenaran diri, kemampuan, kesombongan moral, dan kerja sama jahate lakukan. *Fraud* tidak bisa dipisahkan dari interaksi keenam faktor tersebut. Adopsi *Fraud Hexagon Theory* dalam penelitian ini dianggap lebih kompatibel dengan kondisi terkini, terutama karena pengelolaan keuangan BUMDes tidak hanya berhadapan dengan tantangan moralitas pelaku, tetapi juga kompleksitas sistem digital serta pola-pola kerja sama tidak sehat yang semakin canggih.

Penelitian sebelumnya telah mengulas upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes, terutama dari sisi moralitas dan sistem

pengendalian internal. (Adnyana, 2023) mengungkapkan bahwa moralitas individu memiliki peranan penting dalam menekan kecenderungan kecurangan. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki seorang pengelola keuangan, semakin rendah potensi mereka melakukan penyimpangan, didukung dengan hasil penelitian yang menjelaskan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* sementara itu temuan dalam penelitian (Premana dkk., 2023). Penguatan SPI membantu menutup celah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat pengawasan internal terhadap transaksi keuangan.

Mekanisme pengendalian yang berjalan efektif akan mampu meminimalisasi peluang terjadinya tindakan penyimpangan. Senada dengan itu, (Widyawati dkk.,2023) juga menegaskan nyatanya moralitas individu berkontribusi terhadap keberhasilan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan di BUMDes Amertha, Desa Patas. Meski demikian, dari ketiga penelitian tersebut, belum ada yang secara khusus meneliti sistem informasi akuntansi sebagai variabel mandiri sekiranya apakah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam era digital saat ini, otomatisasi menjadi faktor yang semakin penting dalam menaggulangi dan menciptakan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

SIA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dipaparkan oleh hasil penelitian dari (Bastian & Nurfaliani, 2023). Hal ini mengindikasikan keterlibatan penggunaan SIA, tanpa pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan, memberikan peningkatan risiko terjadinya kecurangan, sehingga dengan ini perlu kembali dilakukan penelitian mendalam terkait dengan pengaruh variabel ini dengan kecenderungan kecurangan. Pengelolaan BUMDes "Semangat Pemuda" di Desa Giri Sasak menjadi contoh

nyata bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan Sistem Informasi Akuntansi (Fidianatun., & Animah., & Mariadi, 2023). Pelaku kecurangan memanfaatkan celah dalam sistem untuk memanipulasi transaksi, seperti memalsukan jumlah transaksi yang diinput, karena kurangnya pemisahan tugas dan bukti transaksi yang memadai.

Kajian pustaka yang telah dipaparkan menunjukkan adanya celah penelitian yang cukup nyata. Sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada pendekatan *Fraud Triangle* yang hanya menaungi tiga bagian, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sementara itu, *Fraud Hexagon Theory* yang dikembangkan oleh Gerogios L. Vounsinas pada tahun 2019 menambahkan tiga elemen penting lainnya yakni kapabilitas, arogansi, dan kolusi yang memberikan gambaran lebih luas dan mendalam tentang bagaimana kecurangan dapat terjadi, khususnya dalam lembaga yang memiliki sistem pengawasan terbatas seperti BUMDes.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah dilakukan pada beberapa lokasi, namun studi yang secara khusus memfokuskan pada SIA di BUMDes Kabupaten Buleleng masih sangat terbatas. Salah satu contoh penelitian dengan variabel SIA adalah penelitian oleh I Putu Julianto bersama rekan-rekan lainnya dengan judul “*Analysis of the Digitalization of Accounting Information Systems in Supporting the Sustainability of MSMEs During the Pandemic (Study on MSMEs in Buleleng Regency)*”. Hal ini menjadi salah satu bukti dari sedikitnya artikel empiris yang membahas implementasi SIA dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan BUMDes pada konteks Kabupaten Buleleng, sehingga diperlukan

penelitian yang lebih mendalam untuk menyediakan bukti kontekstual terkait efektivitas SIA dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana BUMDes di wilayah tersebut.

Ketidakkonsistenan temuan kajian sebelumnya mengenai Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan juga menunjukkan adanya celah riset yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Beberapa studi menemukan bahwa SIA tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sementara studi lainnya justru menunjukkan bahwa ketika pengendalian internal tidak maksimal diterapkan maka bisa saja SIA berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana peran SIA, khususnya dalam konteks BUMDes yang memiliki tantangan sumber daya manusia dan pengawasan yang terbatas, dapat memengaruhi potensi terjadinya *fraud*.

Kesenjangan teori pun menjadi salah satu gap dalam penelitian ini, jika pada penelitian sebelumnya masih memfokuskan pada teori yang dipopulerkan oleh Cressey yaitu *Fraud Triangle* menjelaskan kecurangan melalui tiga pemicu, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Namun, teori ini dinilai tidak selalu memadai dalam menjelaskan fenomena kecurangan saat ini. (I. M. Putra & Dewi, 2022) menegaskan bahwa perkembangan kasus kecurangan, termasuk pada BUMDes, tidak hanya disebabkan oleh tiga faktor tersebut, melainkan juga melibatkan kemampuan pelaku dalam memanfaatkan posisinya (*capability*), sikap arogan (*arrogance*), serta adanya kerja sama atau kolusi (*collusion*).

Penggunaan *Fraud Hexagon* dianggap lebih representatif karena menambahkan tiga faktor tersebut sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Hasil penelitian (I. M. Putra & Dewi, 2022) pada BUMDes di Kabupaten Buleleng juga menunjukkan bahwa variabel *arrogance* dan *collusion* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi, sehingga pengembangan teori *Fraud Hexagon* lebih tepat digunakan untuk menganalisis fenomena kecurangan di BUMDes.

Kebaharuan dalam penelitian ini berdasarkan pula pada gap penelitian dan tentunya terletak pada beberapa hal. Pertama, pemakaian kerangka *Fraud Hexagon Theory* sebagai pendekatan teoritis yang lebih holistik untuk menganalisis kecenderungan kecurangan, menggantikan teori lama yakni *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond* yang umum digunakan pada studi sebelumnya. Kedua, kombinasi variabel yang digunakan yakni moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi belum banyak diteliti secara bersama dalam konteks BUMDes. Ketiga, dari segi cakupan wilayah dan objek penelitian, studi ini difokuskan secara khusus pada BUMDes di Kabupaten Buleleng, yang menjadikannya relevan sebagai lokasi penelitian terkait kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan BUMDes. Secara geografis, Buleleng merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali, dengan bentang wilayah dari kawasan pesisir utara hingga daerah perbukitan dan pegunungan di selatan. Kondisi ini menciptakan keragaman topografi dan tingkat aksesibilitas antarwilayah desa, yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan, koordinasi, dan tata kelola administrasi BUMDes di tiap desa.

Secara struktural, Buleleng juga dikenal sebagai kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Bali, yakni sebanyak 129 desa sesuai dalam data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2025. Jumlah desa yang tinggi ini berdampak langsung pada kompleksitas pengelolaan keuangan desa, termasuk operasionalisasi BUMDes. Setiap desa memiliki kapasitas kemampuan masyarakat, infrastruktur pengawasan, dan sistem informasi yang berbeda-beda, sehingga rawan menimbulkan kesenjangan pengelolaan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bentuk respon atas perlunya penguatan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan berintegritas di lingkup desa, khususnya melalui BUMDes. Tiga variabel yang teliti yaitu moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi dipilih karena ketiganya saling berkaitan dalam membentuk lingkungan kerja yang bersih dan minim penyimpangan. Harapannya, temuan dalam kajian ini bisa kontribusi nyata dalam membenahan operasional BUMDes, menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan desa, serta memperkaya referensi akademik di bidang akuntansi sektor publik. Berdasarkan penjelasan dinamika peristiwa dan uraian latar belakang sebagai penguat fakta, peneliti termotivasi untuk Menyusun penelitian yang berjudul “Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, dan Sisteam Informasi Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada BUMDes di Kabupaten Buleleng”.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu pada penjelasan latar belakang sebelumnya, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masih terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes, terutama di Kabupaten Buleleng, yang tercermin dari berulangnya kasus *fraud* dari tahun 2020–2023, mengindikasikan adanya persoalan yang sistemik.
2. Sistem pengendalian internal pada sebagian besar BUMDes di Buleleng belum berjalan efektif, ditandai dengan lemahnya mekanisme pemisahan tugas, pengawasan internal, serta rendahnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Moralitas individu pada sebagian pengelola BUMDes di Buleleng masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh tidak patuhnya dengan etika kerja, rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta lemahnya rasa tanggung jawab individu dalam melaksanakan tugas dan mengelola dana desa secara profesional dan akuntabel.
4. keterbatasan kompetensi dalam penerapan sistem informasi akuntansi memperbesar peluang terjadinya *fraud*, terutama karena teknologi belum digunakan secara maksimal sebagai alat pencegah penyimpangan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dari apa yang sudah disampaikan dalam identifikasi masalah tersebut maka penelitiann melakukan pembatasan masalah agar tidak keluar dari konteks, untuk itu Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembahasan penelitian mencakup kecenderungan kecurangan yang terjadi pada pengaturan keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buleleng, tidak mencakup lembaga desa lainnya seperti LPD maupun pemerintahan desa secara umum.
2. Variabel independen yang diteliti dibatasi pada tiga faktor internal, yaitu moralitas individu, sistem pengendalian intern, dan system informasi akuntansi yang akan diuji apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Kecenderungan Kecurangan.
3. Objek terkait penelitian ini adalah para pengelola atau pengurus BUMDes yang aktif di Kabupaten Buleleng selama periode penelitian berlangsung.
4. Metode kuantitatif yang digunakan melalui distribusi kuesioner menyebabkan hasil penelitian bersifat umum dan berfokus pada persepsi responden, sehingga tidak mengkaji masing-masing kasus secara spesifik.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Mengacu pada Latar belakang dan pembatasan permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada BUMDes di Kabupaten Buleleng.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam penelitian, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan pengaruh Moralitas Individu terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng.
2. Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng.
3. Mengkaji peran Sistem Informasi Akuntansi dalam memengaruhi kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Buleleng.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini mampu berkontribusi memperkaya literatur dan referensi ilmiah dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana BUMDes, juga dapat menjadi dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Sejalan dengan manfaat teoritisnya penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

a) Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluatif untuk melakukan pengambilan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMDes, khususnya dalam hal penempatan SDM yang memiliki integritas, serta penguatan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna. Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan temuan ini guna meningkatkan kualitas pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang disalurkan ke BUMDes.

b) Bagi Pengelola BUMDes

Pengelola BUMDes diharapkan mampu meningkatkan integritas dalam menjalankan tugas, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan usaha desa secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Bagi Masyarakat

*Output* penelitian juga dapat membuka pemikiran masyarakat, khususnya warga desa, terkait pentingnya pengelolaan dana BUMDes yang bersih dari kecurangan dan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja BUMDes.